

“Jadikan Papua Tanah Damai”

Jayapura, 18 Februari 2005. Dalam jumpa persnya, lima Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) se-Papua menyerukan kepada segenap pihak agar menjadikan Papua sebagai Tanah Damai dengan menangani keadaan hak asasi manusia yang memprihatinkan di Papua akibat meningkatnya suhu politik, kasus-kasus dugaan pelanggaran berat HAM yang belum diselesaikan, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tak kunjung jelas. Karenanya kelima SKP menyampaikan 7 (tujuh) butir rekomendasi agar pemerintah segera menangani keadaan itu dengan memberikan informasi se jelas mungkin kepada masyarakat mengenai kebijakan politik Papua, menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM, dan pelaksanaan agenda Otsus sepenuhnya.

Kelima SKP menemukan berbagai fakta di lapangan bahwa Pilkada merupakan sumber konflik yang amat tinggi karena para politisi Papua telah memperalat sentimen suku dan agama untuk kepentingan politik mereka. “Hal ini kami amati terjadi di Kota Sorong, Sorong Selatan, Raja Ampat, Mimika, Asmat, Tolikara, Mappi, Boven Digul dan Merauke” demikian bunyi pers release yang ditandatangani oleh Jus Mewengkang MSC (Direktur SKP Merauke), J. Budi Hernawan OFM (Direktur SKP Jayapura), Loury da Costa (SKP Sorong), Rudy Rumlus OSC (Direktur SKP Agats-Asmat) dan Saul Wanimbo (SKP Timika). Situasi yang sama terjadi di Irian Jaya Barat akibat Keputusan MK 11 November 2004 yang melanggengkan konflik di Papua.

“Keadaan di Mulia tetap tak kunjung jelas karena pelanggaran kebebasan perorangan tetap berkelanjutan sementara tak ada tanda-tanda bahwa Komnas HAM akan membentuk tim investigasi untuk ini”, demikian tegas kelima SKP yang tengah mengadakan pertemuan tahunan mereka di Sentani, Jayapura. Di bidang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, kelima SKP menyoroti kenyataan di lapangan dimana Otsus yang digembar-gemborkan oleh pemerintah selama ini tidak terbukti di lapangan.

“Kebijakan Otonomi Khusus yang menaruh perhatian pada pemenuhan hak atas kesehatan dan pendidikan tidak berjalan sesuai harapan. Kesehatan masyarakat semakin merosot akibat kurangnya sarana pelayanan, obat-obatan, dan tenaga kesehatan yang tidak menjawab kebutuhan masyarakat luas. Fakta-fakta ini kami temukan di wilayah pedalaman seperti di Raja Ampat, Teluk Bintuni, Mimika, Mappi, Merauke, Boven Digul, Asmat, Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang dan Jayawijaya”. Karenanya tak heran bahwa tingkat *Human Development Index* (HDI) Papua menempati tempat terendah kedua di Indonesia padahal penghasilannya menduduki tempat ketiga tertinggi di Indonesia.

SKP adalah badan pelayanan Gereja Katolik di Papua di bidang hak asasi manusia dan upaya membangun damai, yang terdapat di lima keuskupan, yakni Keuskupan Agung Merauke, Keuskupan Jayapura, Keuskupan Manokwari-Sorong, Keuskupan Agats-Asmat dan yang termuda, Keuskupan Timika. SKP-SKP bekerja sama dengan berbagai kalangan yang secara sungguh-sungguh mencoba membangun damai dan keadilan di Papua, seperti kalangan pemerintah, LSM, perempuan, adat, mahasiswa, aktivis politik dan kalangan lainnya (*).